

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arifin, Zainal, & Hiariej, Eddy, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*, Publikasi BPS DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Daradjat, Adjat, 2018, *Hubungan Industrial Pendekatan Koprprehensif-Interdisiplin*, Alfabeta, Bandung.
- Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 2004, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Heron, Robert, 2002, *Labour Administration: an introduction*, ILO Publication, Geneva.
- Husni, Lalu, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok.
- Internasional Labour Organization, 2010, *Labour Inspection: What It Is And What It Does A Guide For Employers*, ILO Publication, Geneva.
- Internasional Labour Organization, 2021, *Manual for labor inspection during the pandemic*, ILO Publication, Jakarta.
- Kartasapoetra, *et.al.*, 1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

- Kay, Geoffrey, dan Mott, James, 1982, *Political Order and The Law of Labour*, The Macmillan Press Ltd, London.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2022, *Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 6*, Publikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2021, *Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024*, Publikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Koencoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), 2005, *Hak Pekerja dan Jaminan Sosial*, KOMNAS HAM Press, Jakarta.
- M. Situmorang, Victor, & Juhir, Jusuf, 1994, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Manulang, Sendjun, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muda, Arifuddin, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Batu.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rajagukguk, HP, 2000, *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Determination)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suardi, Rudi, 2007, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Penerbit PPM, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suratman, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Uwiyono, Aloysius, *et.al.*, 2018, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Press, Depok.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya, Yohannes, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca-amandemen ke-IV.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.02/MEN/I/2011 Tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39).

Peraturan Bersama Kemendagri dan Kemenakertrans Nomor 14 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 743).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 487).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan.

C. Artikel, Jurnal, dan Penelitian

- Hidayah, Khoirul, “Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kota Malang”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015.
- Ispriyarso, Budi, *et.al.*, “Optimalisasi Pengawasan Sistem Outsourcing Sebagai Upaya Menunjang Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1, 2012.
- Murni, Sheren, *et.al.*, “Reposisi Pengawas Ketenagakerjaan Bagi Penegakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Januari 2021.
- Wedderburnm, Lord, “Collective Bargaining or Legal Enactment: The 1999 Act and Union Recognition”, *Industrial Law Journal* (Vol. 29, No. 1, Maret 2000).

D. Internet

- Binwasnaker & K3, “Menaker Ida: Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus Turun”
<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-kasus-pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-terus-turun>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023.
- Binwasnaker & K3, “Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Harus Lebih Terukur, Professional, Dan Terpercaya”
<https://kemnaker.go.id/news/detail/penegakan-hukum-ketenagakerjaan-harus-lebih-terukur-profesional-dan-terpercaya>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023.
- Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”,
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4923/badan-legislasi-dpr-ri-menyetujui-ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat, “UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia Lebih Maju,”
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dan Inovasi Pengawasan Ketenagakerjaan di

Indonesia”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_549805.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan RI & Internasional Labour Organization, “Lembar Fakta: Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549703.pdf, diakses pada tanggal 8 April 2021.